



Judul : Evita Nursanty Raih Gelar Doktor
Tanggal : Sabtu, 16 Januari 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Evita Nursanty Raih Gelar Doktor

ANGGOTA Fraksi PDIP Evita Nursanty meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam sidang terbuka yang digelar di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Legislator yang duduk di Komisi I DPR ini mempertahankan disertasi mengenai diplomasi parlemen dengan mengambil contoh kasus terorisme. Tampak hadir juga sejumlah tokoh nasional dalam sidang disertasi itu, seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Wantimpres Sidarto Danusubroto, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, Profesor Purnomo Yusgiantoro, dan bekas anggota DPR Susaningtyas Kertopati.

Dalam disertasi yang meneliti diplomasi parlemen dengan contoh kasus terorisme, Evita memfokuskan diri pada peran parlemen dalam penguatan politik luar negeri dan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas, dan fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Selama ini, menurut Evita, peran parlemen dalam politik luar negeri tidak terlalu banyak disinggung dengan alasan politik luar negeri merupakan domain dari pemerintah sebagai representasi negara. Padahal, konstitusi Indonesia mengatur ada peran parlemen dalam membuat perjanjian dengan negara lain, termasuk pengangkatan para duta besar.

"Karena itu dalam penelitian ini saya mencoba memberikan nomenklatur dengan konsep baru peran DPR dalam politik luar negeri dengan tipe "Track One and Half", katanya.

Dikatakan "One and Half Track" karena DPR juga berperan sebagai bagian dari "state" atau lembaga negara sebagaimana juga diatur dalam UU MD3, atau "Track One", dan di sisi lain DPR merupakan representasi rakyat atau pembawa suara rakyat yang dipilih melalui pemilu yang dikenal dengan "Track Two".

Evita menyebut, dalam studi hubungan internasional ada berbagai tipe diplomasi yang sudah dikenal, yakni: formal diplomacy, track one diplomacy, track two diplomacy, dan multi-track diplo-

macy sebagaimana disampaikan Diamond & McDonald, Ziegler, Magalhaens dan juga Montville.

Selain itu ada juga istilah soft diplomacy dan hard diplomacy, bahkan terakhir ini muncul istilah smart diplomacy. Semua tipe diplomasi ini dalam rangka pencarian resolusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat internasional.

Untuk menjalankan One and Half Track Diplomacy ini, Evita menyarankan perlunya dilakukan revisi undang-undang khususnya UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang sesuai semangat konstitusi.

Selain itu perlunya pembenahan atau pengaturan hubungan koordinasi antara Kemlu RI dengan DPR (BKSAP) termasuk dengan kementerian atau lembaga pemerintah lain yang terkait dengan hubungan luar negeri, secara lebih jelas, sehingga terjadi hubungan yang sinergi dan terkoordinasi sebagai institusi "State" yang menjalankan misi kenegaraan yang sama.

"Perlunya pembenahan di internal DPR sehingga pelaksanaan peran dan fungsi diplomasi parlemen dapat dilakukan secara efektif, baik itu koordinasi efektif antara Komisi-komisi DPR dengan BKSAP, efektifitas pemilihan anggota terkait kerjasama bilateral maupun multilateral, hingga publikasi berbagai kegiatan diplomasi parlemen," ujarnya.

Terkait pembahasan isu terorisme di Inter Parliamentary Union (IPU), Evita menyebut, selama ini parlemen Indonesia sangat aktif memberikan kontribusi dalam pembahasan isu ini apalagi Indonesia menjadi korban aksi terorisme internasional selama ini.

"Peran DPR dalam diplomasi ini juga mendorong DPR mendukung lahirnya perundangan terkait tindak pidana terorisme, pembentukan badan atau institusi baru," terangnya.

IPU merupakan wadah parlemen dari banyak negara atau lintas-negara. Sehingga penelitian ini memenuhi prinsip dasar Trygve Mathissen yang menyebutkan bahwa kajian hubungan internasional melintasi batas negara sebagai aspek penting dari aspek internasional. ■ QAR